

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan. Pola yang diterapkan adalah peningkatan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan mendapat capaian tingkat kemandirian (Soleh, 2014). Inisiatif pengembangan e-government berbasis masyarakat telah ada sejak 2011. Sistem informasi desa (SID) terbukti mampu memberikan layanan kepada masyarakat lebih cepat dalam mendapatkan dokumen-dokumen pribadi, surat-menyurat maupun aktivitas pengecekan data diri secara online. Model layanan berbasis SID ini merupakan konvergensi dari media-media yang telah ada sebelumnya, seperti radio komunitas, tabloid, dan forum warga (Dewi, 2011).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 86 menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui SID yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah kota. SID yang dimaksud dalam undang-undang Desa adalah fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, sumber daya manusia, serta sumber daya informasi meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. UU ini semakin menguatkan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa melalui penerapan SID, mendorong pemerintahan desa menuju masyarakat mandiri, dan menjadi obyek sekaligus subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

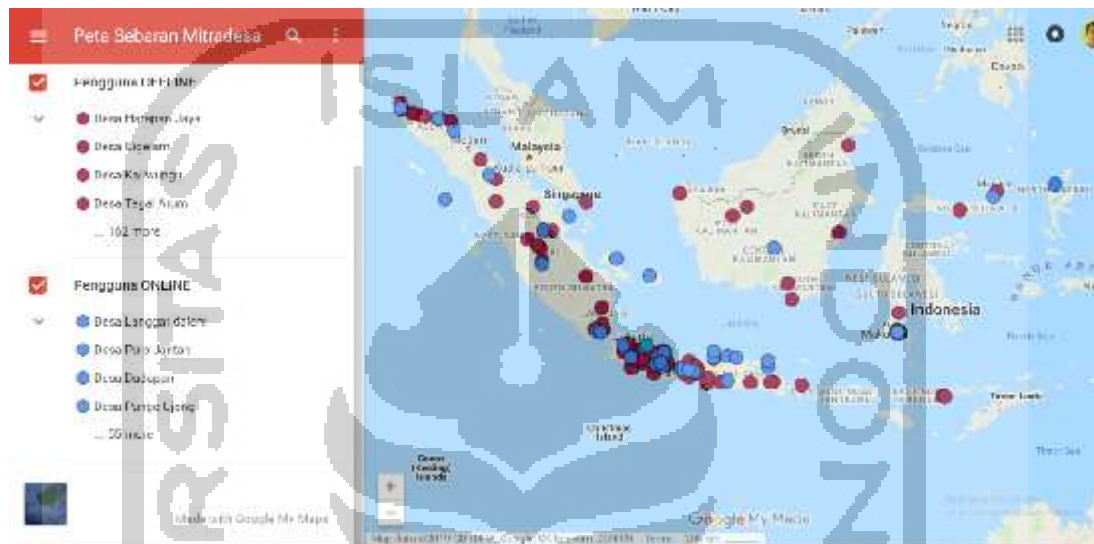
Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut UU tentang Desa menjelaskan bahwa, pembangunan desa mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada dasarnya data dan informasi yang dimiliki desa telah ada sejak saat sebuah desa berada dalam struktur pemerintahan NKRI. Pemerintah desa bekerja dengan buku-buku untuk mengelola data pemerintahan, data kependudukan, data keuangan desa, daftar aspirasi dari BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan profil desa. Data diolah oleh operator dari perangkat desa menjadi informasi yang terpampang di kantor desa dalam bentuk monografi. Informasi umum yang ditampilkan dalam monografi, antara lain: data sosial, ekonomi, ketenteraman, ketertiban, bencana dan kewilayahan. Perkembangan ICT telah menjadi bagian integral dari pemerintah dan menjadi harapan bagi publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan secara online (Róiste, 2013). Penggunaan metode yang tepat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-government pada tingkat individu dan organisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan konten lokal dan melakukan sosialisasi layanan untuk menggantikan layanan publik sebelumnya yang tidak efisien dan tidak efektif (Bwalya & Mutula, 2016). SID merupakan suatu usaha untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, sesuai kebutuhan warga dan untuk menunjang pembangunan desa. SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa dan memudahkan proses pencarian data. Dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem yang berisi mekanisme, prosedur, tujuan dan pemanfaatannya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah desa (Jahja, Herry, & Afandi, 2014) (CRI, 2017).

SID adalah produk teknologi informasi yang bersifat *free open source software* (FOSS) untuk mengolah data dasar dan informasi desa berbasis komputer yang mencakup: data kependudukan, data dan informasi keuangan desa, data aset atau sumber daya desa dan olah data analisis kemiskinan partisipatif. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan komunitas yang ada. Penerapan SID ini mengusung prinsip partisipatif, inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Keberadaan data dasar ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa melalui pengelolaan oleh tenaga operator yang memiliki kewenangan hak akses ke dalam sistem. Sementara, *user* pengelola SID di luar pemerintahan desa dibatasi pada fungsi olah informasi sebagai berita. Berdasarkan data CRI Yogyakarta, desa yang telah menerapkan SID hingga tahun 2015 telah mencapai lebih dari 1330 desa yang terdiri dari 7 propinsi, yaitu: propinsi Sumatera Utara, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan (Wijoyono, 2016).

Selain CRI, data pengguna SID dengan nama <http://sisdesa.id/> hingga tahun 2019 mencapai 57 desa di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah

dan 2 desa di kecamatan Moyudan, kabupaten Sleman. Adapun pengguna SID dari gerakan desa membangun (GDM) dengan nama aplikasi “mitradesa atau lumbung” hingga desember 2013, tercatat 25 desa telah menerapkan aplikasi mitradesa yang diawali oleh Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas (Dewi, 2013). Sebaran pengguna SID mitradesa dari GDM dengan basis aplikasi offline dan online hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Sebaran pengguna SID mitradesa – GDM 2019

Pemanfaatan SID memerlukan pengelolaan data dan informasi yang lebih baik dan harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa. SID dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Kemudahan akses, fasilitas akun dan keterbukaan informasi publik akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partisipatif, gotong royong, swadaya, dan pengawasan. Sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah desa berbasis SID dapat menjadi pendamping dalam memenuhi kebutuhan sistem monitoring dan evaluasi desa yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga supra desa. Instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi desa yang dibutuhkan, antara lain Prodeskel dari Kementerian dalam negeri, Podes dari biro pusat statistik, IDM dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dan APBDes.

Salah satu desa yang menerapkan SID dalam menjalankan tata kelola pemerintahan adalah Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Secara geografis desa yang berada pada dataran tinggi dan langganan longsor tiap tahun ini memerlukan koordinasi

dan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang keadaan dan perkembangan wilayah dari waktu ke waktu. Lahirnya KIM dengan nama “Pena” merupakan solusi tepat dalam mempersiapkan segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Dalam perkembangannya, KIM Pena mampu menjalankan fungsinya sebagai komunitas dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam mewujudkan gerakan informasi desa. Produk yang dihasilkan oleh KIM Pena melalui prakarsa inovatifnya adalah radio komunitas dan majalah “DESAKU”.

Radio komunitas yang aktif melalui pesawat HT di 143480 – radio 143770 dan frekuensi modulasi (FM) 93.5 Mhz tersebut, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana, seperti: longsor, tanah retak yang sering terjadi. Kepala desa dan KIM Pena Desa Ngumbul senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif untuk mengingatkan warga, RT, RW, Kasun, dan para tokoh desa terutama pada musim penghujan tentang bahaya yang mengancam tersebut.

KIM Pena hadir melalui berita, informasi, berbagi peran, menguatkan akses, mendorong diskusi, dan mengimplementasikan peran sebagai agen informasi. Radio komunitas sebagai media yang ada, dikelola dan diperuntukkan sebagai alat komunikasi yang cepat. Sedangkan majalah desa merupakan media cetak yang mendokumentasikan aktivitas, potensi, dan informasi desa. Peningkatan literasi warga melalui wadah komunitas KIM Pena semakin berkembang seiring jangkauan akses internet masuk desa. Internet segera menjadi konsumsi, diversifikasi produk yang dibutuhkan warga dan meningkatkan pengetahuan tentang TIK sebagai masyarakat yang melek informasi. Komunitas yang dimotori oleh dua jurnalis warga (JW) ini memanfaatkan teknologi yang hadir dengan membuat laman website <http://kimpena.kabpacitan.id> sekaligus untuk mengakomodir warga desa yang merantau, berdomisili di tempat lain dan ingin memberikan kontribusi positif kepada desa asal.

Tahap berikutnya KIM Pena mampu menjadi mitra bagi pemerintah desa dan memberikan dukungan kepada Kepala desa maupun perangkat desa, agar memiliki website dengan membeli domain dan hosting. Situs <http://ngumbul.desa.id> merupakan laman yang dapat menampilkan profil desa, memberikan dorongan terhadap keterbukaan dana desa, keterbukaan informasi publik dan menampilkan potensi desa. Dukungan muncul dari BAPPEDA-KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) kabupaten Pacitan dalam program penanggulangan kemiskinan yang terhubung dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional dengan memperkenalkan sistem

informasi desa dari CRI Yogyakarta. Pemerintah daerah kabupaten Pacitan turut mendukung penerapan SID di Desa Ngumbul dengan memberikan fasilitas migrasi gratis dari website desa ke SID berbasis website dengan alamat <http://ngumbul.kabpacitan.id> dan dukungan pembangunan infrastruktur server yang tersimpan pada kantor diskominfo kabupaten Pacitan. Desa Ngumbul memanfaatkan potensi SID berbasis web dari CRI untuk memperbaiki kualitas data kependudukan, menampilkan potensi desa, mendorong partisipasi warga masyarakat dan mendorong keterbukaan informasi agar terwujud pelayanan prima.

Penelitian ini mengkaji dampak keberhasilan penerapan e-government: sistem informasi desa agar diperoleh penjelasan tentang keberhasilan penerapan SID dari aktivitas para aktor yang terlibat dalam membentuk jaringan-aktor. Dampak penerapan SID di Desa Ngumbul dapat menjadi sebuah contoh replikasi dalam keberhasilan penerapan SID bagi desa-desa lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana menjelaskan keberhasilan penerapan sistem informasi desa (SID) di Desa Ngumbul dalam perspektif *Actor Network Theory* ?
2. Apa dampak keberhasilan penerapan sistem informasi desa (SID) di Desa Ngumbul tersebut ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem informasi desa yang digunakan adalah SID berbasis website.
2. Skala penelitian hanya pada penerapan SID, bukan pada aplikasi perangkat lunak SID, manajemen module pengguna (admin) ataupun ,manajemen modul website

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pengetahuan yang menjelaskan tentang keterlibatan aktor-aktor dalam membentuk suatu jaringan keberhasilan penerapan sistem informasi desa (SID) di Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

2. Mengetahui dampak keberhasilan penerapan sistem informasi desa (SID) di Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

### **1.5 Manfaat atau Kontribusi Penelitian**

Penelusuran literatur yang dilakukan, belum menemukan penelitian yang mengkaji secara empiris dampak keberhasilan penerapan SID dalam berbagai perspektif sebagai sebuah *tool* tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kontribusi secara teoritis dan kontribusi praktis.

Kontribusi secara teoritis di dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek: kontribusi *revelatory* dan kontribusi *incremental*. Kontribusi *revelatory* yaitu membantu memahami fenomena yang diteliti dengan menghadirkan pengetahuan yang sebelumnya masih belum jelas berkenaan dengan dampak keberhasilan penerapan sistem informasi desa. Sedangkan kontribusi *incremental* yaitu pernyataan konsep dan keterkaitannya dengan memberikan tambahan tilikan baru dengan memperjelas penelitian sebelumnya. Kemanfaatan teoritis memungkinkan konsep dioperasionisasikan dan diuji dalam penelitian. Sedangkan kontribusi praktis adalah menghadirkan pelajaran yang langsung dapat diterapkan atau direplikasikan di desa lain. Pelajaran yang menjelaskan tentang keterlibatan aktor-aktor pada perannya masing-masing dalam membentuk jaringan keberhasilan penerapan SID di desa Ngumbul kabupaten Pacitan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB 1 Pendahuluan**

BAB ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 Tinjauan Pustaka**

BAB ini menguraikan landasan teori dari berbagai pandangan para peneliti sebelumnya mengenai teori – teori yang berhubungan dengan bahasan dalam penelitian, meliputi sistem informasi, model kesuksesan sistem informasi, e-government dan *open government data* sistem informasi desa, *actor network theory*, translasi *actor* dalam jaringan sesuai dengan konteks keberhasilan penerapan sistem informasi desa.

### **BAB 3 Metodologi Penelitian**

BAB ini menguraikan langkah - langkah penyelesaian dalam penelitian yang menjelaskan, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian dan profil desa Ngumbul.

### **BAB 4 Hasil dan Pembahasan**

BAB 4 membahas tentang hasil dan pembahasan data yang diperoleh berdasarkan momen translasi: *moment of problematization, moment of intereseement, moment of enrolment* dan *moment of mobilization* dari perspektif *actor network theory*.

### **BAB 5 Kesimpulan dan Saran**

BAB 5 memuat simpulan yang merupakan rangkuman dari hasil analisis pada bagian sebelumnya dan berisi saran - saran yang perlu mendapatkan perhatian mengenai keterbatasan dari temuan dalam penelitian ini dan asumsi - asumsi yang dibuat dalam penyusunan tesis dan saran untuk penelitian selanjutnya tentang sistem informasi desa.

